

BPK Minta Intensi terhadap Lingkungan

10 Kabupaten Turun Poin Selesaikan Rekomendasi

PONTIANAK, TRIBUN - Sebanyak 10 dari 15 pemerintah daerah di Kalimantan Barat mengalami penurunan poin dalam penilaian yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan laporan keuangan Semester II Tahun 2011.

Dalam kesempatan itu BPK juga meminta agar pemerintah memperhatikan persoalan lingkungan.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Adi Sudibyo, Jumat (20/1), mengatakan hal itu berdasar hasil pantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK.

"Ini juga wujud apresiasi dan pemacu atas keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan," ujar dia.

Berdasarkan pemeriksaan BPK Perwakilan Kalbar, peringkat pertama Kabupaten Kubu Raya dengan skor 60 (naik satu poin); kedua Kabupaten Kapuas Hulu skor 53 (turun empat poin); peringkat tiga Kabupaten Sintang skor 44

77 Ini juga wujud apresiasi dan pemacu atas keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan. 77

ADI SUDIBYO

Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar

(naik 10 poin) dan Kabupaten Sambas skor 42 (turun 15 poin). Peringkat empat Kabupaten Sanggau skor 37 (naik 10 poin); kelima Kabupaten Landak skor 34 (turun 10 poin); keenam Kota Pontianak skor 32 (naik tiga poin); Kabupaten Kayong Utara skor 29 (turun 8 poin).

Peringkat ketujuh Kabu-

paten Bengkayang skor 28 (turun 15 poin), Kota Singkawang skor 27 (turun 7 poin); kedelapan Kabupaten Sekadau skor 24 (turun 18 poin), Kabupaten Pontianak skor 23 (turun 10 poin), Kabupaten Ketapang skor 23 (naik satu poin). Peringkat sembilan Provinsi Kalbar skor 12 (turun 10 poin) dan

Kabupaten Melawi skor 12 (turun dua poin).

Secara keseluruhan, dari rekomendasi yang telah diberikan BPK, 65,46 persen diantaranya sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan 29,3 persen tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan 5,24 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Adi Sudibyo juga mengatakannya dalam melakukan audit pihaknya memberikan perhatian khusus dan pembangunan harus berawasan lingkungan. Dikatakannya, Pemda dan DPRD untuk tetap mengikuti peraturan yang ada mengingat konsekuensi yang berat dari

peraturan yang menyangkut pidana kehutanan.

"Ke depan lebih, interest terhadap lingkungan. Seperti pada pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di kawasan hutan dengan tidak didahului izin penggunaan kawasan hutan dari Kemhut. Selain itu analisis dampak lingkungan juga tidak dilaksanakan dengan baik," ujar Adi Sudibyo.

Terkait pelaksanaan PDPT atas PAD pada Pemkot Pontianak dan Singkawang, harus diperhatikan tingginya penarikan PAD. Semakin tinggi PAD maka memperkecil porsi alokasi dana bantuan pusat. (thd/ant)

Penyelesaian

Rekomendasi

- Kabupaten Kubu Raya
- Kabupaten Kapuas Hulu
- Kabupaten Sintang
- Kabupaten Sambas
- Kabupaten Sanggau
- Kabupaten Landak
- Kota Pontianak